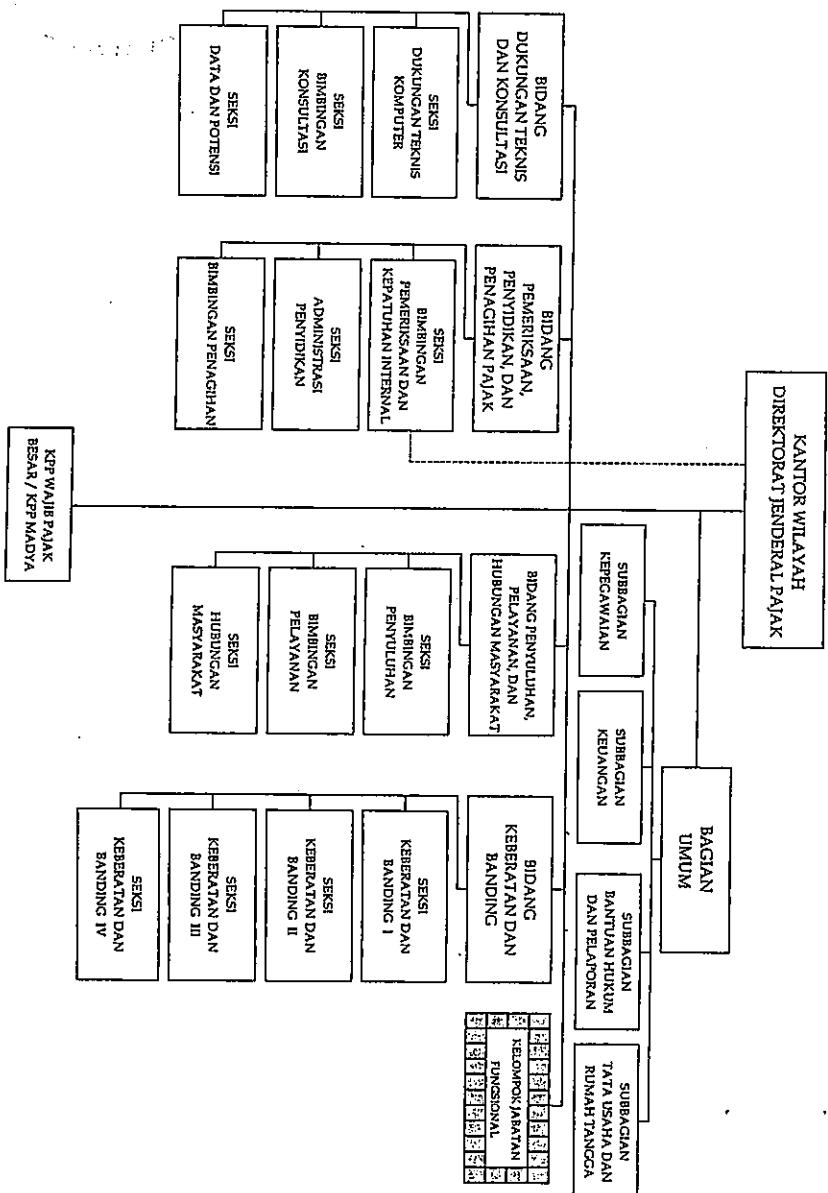




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

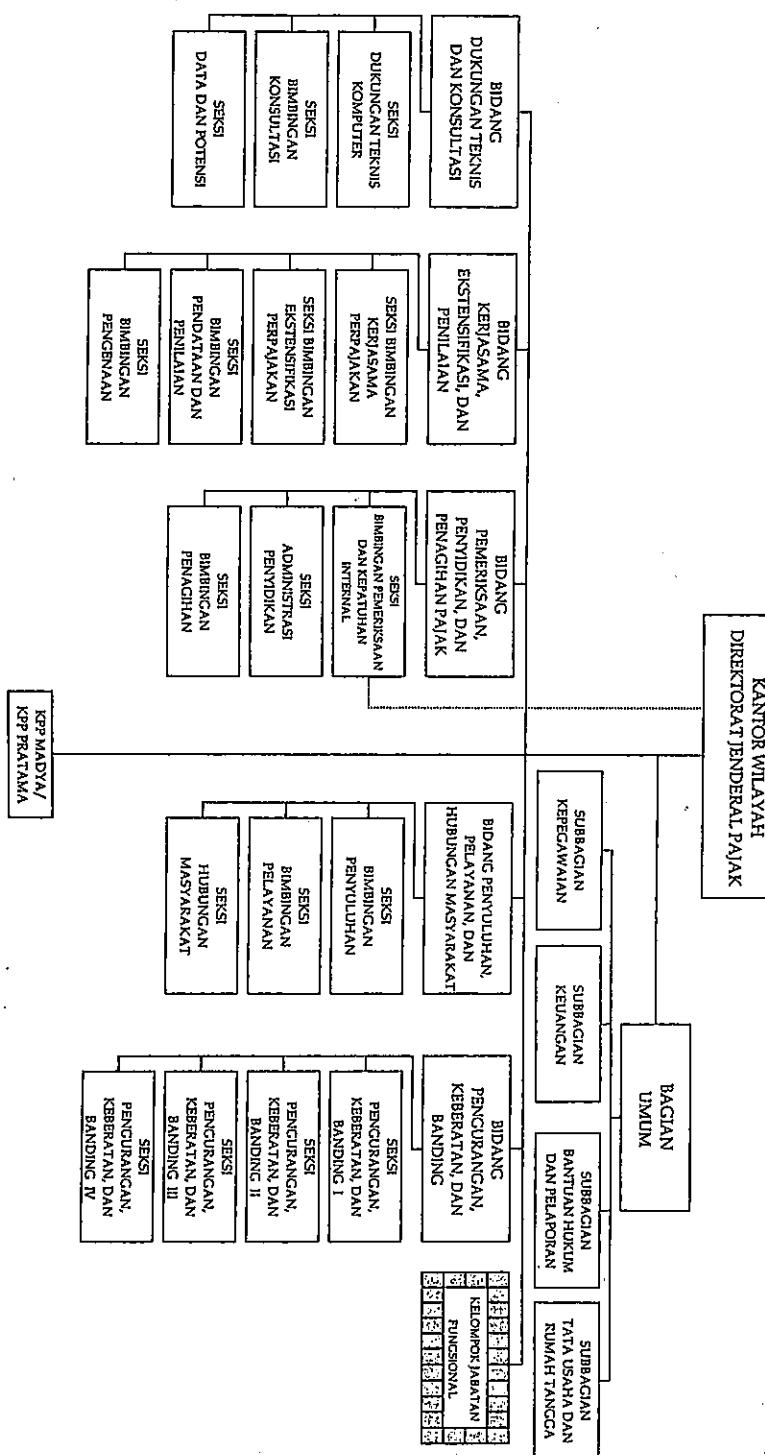


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.01/2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.01/2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

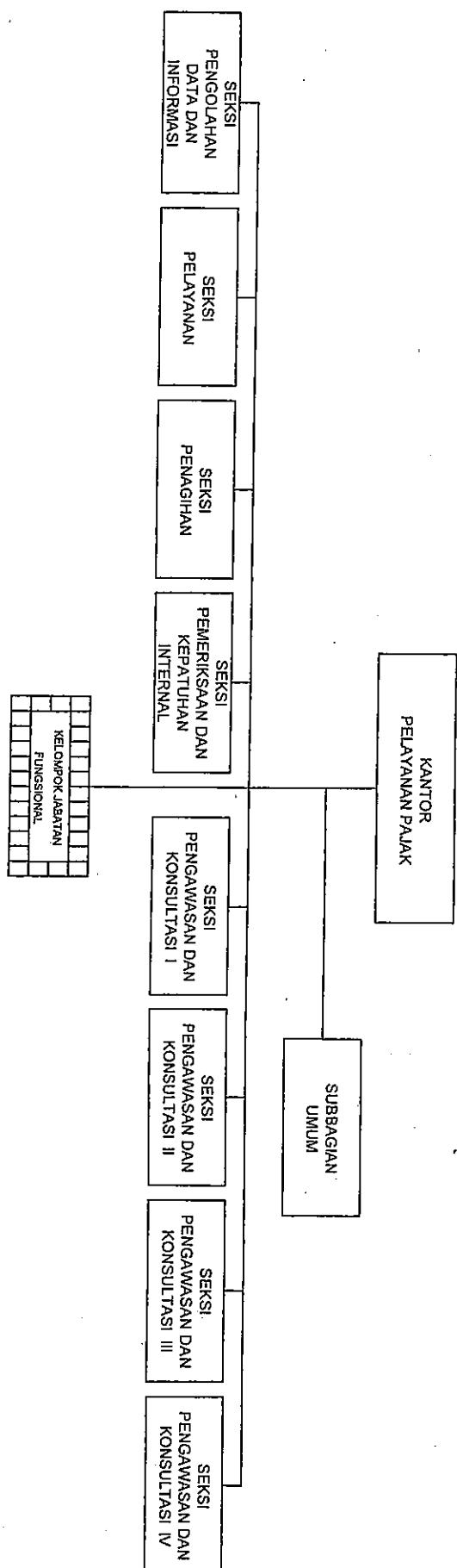




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

BAGAN ORGANISASI



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.01/2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

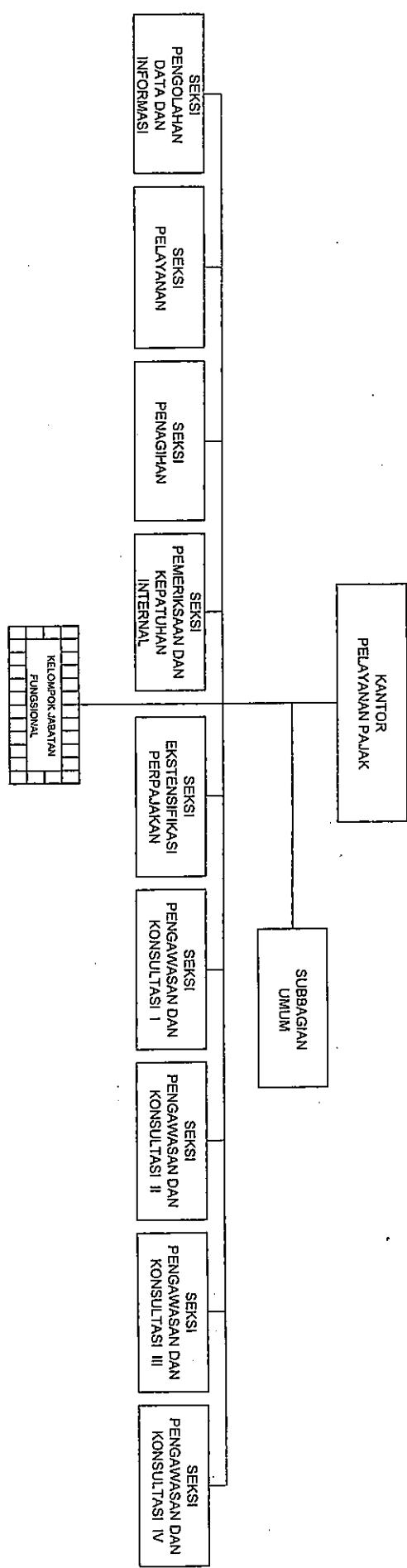


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IV

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.01/2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

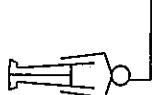




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN

KANTOR
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN,
DAN KONSULTASI PERPAJAKAN



PETUGAS TATAUSAHA



KELompok Jabatan
FUNSIONAL

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.01/2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK